

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 – 2015 DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

**Mosses Nelwan dan Iis Siti Aisah**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*mossesnelwan@gmail.com*

### **ABSTRACT**

Local financial performance is one measure to see the ability of local in the running local autonomy, especially in implementing fiscal decentralization. Seeing this, the authors are interested in doing research with the title "**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF FISCAL YEAR 2011 - 2015 SUMEDANG REGENCY WEST JAVA**" to measure how much of Sumedang implement fiscal decentralization by looking at the financial performance.

The research combines qualitative research to strengthen the quantitative calculation results with sequential explanatory research model (mixed method). Quantitative data analysis carried out by calculating of the local financial performance with the regression analysis to measure the relative influence the independent variable of the financial performance. While the analysis of qualitative data through interviews to the relevant parties to strengthen the results of quantitative measurements.

Result showed that the financial performance of Sumedang seen from the calculation shows the ratio of Degree of Fiscal Decentralization less criteria, with an average calculation of 12% over the five-year budget. Regional Financial Independence Ratio shows a instructive relationship. Growth ratio showed an fluctuated. Effectiveness and efficiency ratios showed criteria PAD is very effective and very efficient. Liquidity ratio to the current ratio is 2.87 while the current ratio shows 2.59. And Asset Turnover ratio shows the number of 10%. Based on these research also known factors that significantly influence the financial performance of Sumedang are PAD and Asset whereas Transfer have negativly significant influence to financial performance with the contribution of the effect of 100%. The Government of Sumedang have some efforts done to increase financial performance through socialization, Land Value Zona program, repeated data collection, and intensification or extensification of local tax.

**Keywords:** *Local Financial Performance, PAD, Transfer.*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdesentralisasi dengan kedaulatan mutlak berada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Keberadaan sistem ini dibutuhkan agar organisasi negara mampu menjalani arah dan tujuan-tujuan yang diinginkan secara efektif melalui desentralisasi. Desentralisasi dipandang sebagai pelimpahan kekuasaan

pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yaitu kewenangan daerah untuk menggali potensi keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, artinya daerah diberikan kesempatan serta tanggungjawab untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh setiap daerah.

Sadar akan keterbatasan serta perbedaan potensi tiap-tiap daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah memberikan kemudahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga kemampuan daerah untuk mengelola keuangan ditandai dengan kemampuannya dalam mengelola sumber-sumber pendapatan berupa PAD, sedangkan adanya dana transfer yang diberikan pemerintah pusat hanya untuk mengimbangi kesenjangan fiskal yang terjadi baik antara daerah dan pusat maupun antar daerah satu dengan yang lainnya, ataupun dana transfer diberikan untuk menutupi kekurangan belanja daerah yang belum dapat dipenuhi hanya melalui instrumen PAD.

Salah satu ciri keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah

terletak pada bagaimana kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang sedikit karena diharapkan PAD menjadi bagian utama dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Akan tetapi realitasnya fenomena yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, komposisi dana transfer selalu lebih besar dari PAD sehingga terkesan daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat karena menjadikan dana transfer sebagai sumber dana utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Dalam Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa :

**Tabel 1**  
**Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2016**  
 (dalam jutaan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	144.923	150.444	170.748	260.719	318.552	327.453
<b>Transfer Daerah</b>	1.118.056	1.280.927	1.486.322	1.642.734	1.312.916	1.763.127
<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	71.85	43.203	36.366	165.83	791.183	402.935
<b>Total Pendapatan</b>	1.334.831	1.474.584	1.693.437	2.069.304	2.422.651	2.493.516
<b>Belanja Daerah</b>	1.311.119	1.501.288	1.739.725	2.188.546	2.573.745	2.629.639
<b>Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah</b>	10.9%	10.2%	10.0%	12.6%	13.14%	13.13%

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi transfer daerah dalam total pendapatan APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2011 – 2016 masih mendominasi sehingga terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara PAD dan transfer daerah yang pada akhirnya prosentase PAD hanya mencapai pada 13.13% dari total pendapatan, angka tersebut masih jauh dari ideal PAD terhadap total pendapatan yang seharusnya mampu di atas 30%. Oleh karena itu dengan melihat keadaan tersebut, maka Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai daerah otonom masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer daerah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang.

### Tinjauan Teoretis

Halim (2004: 24) berpendapat bahwa “kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.” Itulah sebabnya mengapa keberhasilan suatu daerah otonom salah satunya ditentukan atas kemampuan untuk mengelola anggaran. Asumsi itu juga diperkuat oleh Syamsi, (1986:199) yang menjelaskan “kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan

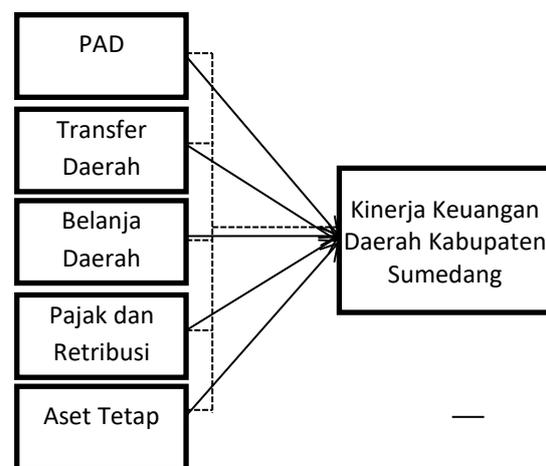
mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan penelitian secara kualitatif untuk memperkuat hasil perhitungan secara kuantitatif dengan model penelitian *sequential exploratory (mixed method)*. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio kinerja keuangan daerah serta analisis regresi untuk mengukur hubungan pengaruh variabel bebas kinerja keuangan daerah. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang menurut Mahmudi (2010: 142) dan Weston dalam Kasmir (2012: 106) dapat diterapkan, yaitu :

1. Rasio Derajat Desentralisasi;
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
3. Rasio Pertumbuhan PAD;

Analisis regresi yang mengukur hubungan pengaruh variabel bebas dan terikat yaitu :



**Skema 1**  
**Variabel Bebas dan Terikat**

Berdasarkan skema tersebut, dalam penelitian ini hendak menguji apakah indikator-indikator kinerja keuangan (X) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y).

Sedangkan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang terkait untuk memperkuat hasil pengukuran kuantitatif. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

3. *Concluding Drawing* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan suatu gambaran atas fakta-fakta di lapangan berdasarkan hasil perhitungan rasio dan

analisis data statistik yang diperoleh dari pengumpulan data secara sekunder untuk mengukur kinerja keuangan daerah di Kabupaten Sumedang. Selain itu, hasil penelitian akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan daerah berdasarkan perhitungan rasio kinerja keuangan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan berdasarkan hasil statistik yang diperlukan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Berikut adalah analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang dengan menggunakan indikator kinerja keuangan daerah berdasarkan teori Mahmudi dan Weston.

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator yang mengukur kinerja keuangan daerah dengan melihat kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dibandingkan dengan prosentase pendapatan daerah secara keseluruhan.

Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{DDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan demikian kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang diukur dengan menggunakan rasio ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio DDF
2011	139,823,277,566.34	1,349,199,014,838.34	10%
2012	161,995,577,347.89	1,494,452,792,261.89	11%
2013	189,612,071,919.53	1,715,190,458,848.53	11%
2014	301,800,842,760.30	2,087,159,777,352.30	14%
2015	327,369,262,021.11	2,357,057,542,810.11	14%
<b>Rata-rata</b>			<b>12%</b>

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan tiap tahunnya, sehingga rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun anggaran Kabupaten Sumedang berada pada persentase 12%. Namun kenaikan tersebut masih belum menunjukkan persentase PAD Kabupaten Sumedang yang bisa mengimbangi pendapatan daerah dari sektor lainnya terutama dari sumber dana transfer daerah.

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. Rasio ini membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan dana transfer yang diterima.

Adapun Rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2011	139,823,277,566.34	1,137,681,408,772.00	12%
2012	161,995,577,347.89	1,293,045,949,474.00	13%
2013	189,612,071,919.53	1,492,190,114,494.00	13%
2014	301,800,842,760.30	1,637,679,747,440.00	18%
2015	327,369,262,021.11	2,027,429,280,789.00	16%
<b>Rata-rata</b>			<b>14%</b>

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

Perhitungan rasio diatas menunjukkan adanya kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang tiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebanyak 2%. Rata-rata rasio ini dalam kurun tahun 2011 hingga 2015 yaitu sebesar 14%, bahkan belum mencapai persentase ideal untuk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah dalam hal desentralisasi fiskal.

### 3. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat mempertahankan ataupun meningkatkan

PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana hasil perhitungan rasio sebelumnya yang menunjukkan rendahnya pengelolaan PAD yang ada sehingga menjadikan Kabupaten Sumedang masih sangat ketergantungan kepada dana transfer dan untuk mengukur sejauhmana upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari PAD salah satunya dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD.

Adapun rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Sumedang selama tahun anggaran 2011 hingga 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	PAD $t_0$	PAD $t_1$	Rasio Pertumbuhan PAD
2010-2011	108,646,803,911.20	139,823,277,566.34	29%
2011-2012	139,823,277,566.34	161,995,577,347.89	16%
2012-2013	161,995,577,347.89	189,612,071,919.53	17%
2013-2014	189,612,071,919.53	301,800,842,760.30	59%
2014-2015	301,800,842,760.30	327,369,262,021.11	8%
<b>Rata-rata</b>			<b>26%</b>

**Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017**

Berdasarkan perhitungan rasio di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif yang cenderung signifikan, seperti pertumbuhan PAD dari tahun 2013 ke tahun 2014 yang mengalami peningkatan yang tajam yaitu sebesar 59% kemudian pada

tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8%. Sehingga rata-rata pertumbuhan PAD dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebesar 26%. Walaupun pada kenyataannya PAD Kabupaten Sumedang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya seperti yang

ditunjukkan pada rasio sebelumnya, namun kenaikan tersebut terjadi secara fluktuatif seperti yang ditunjukkan melalui rasio pertumbuhan PAD diatas.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan di atas ditanggapi oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi BAPPENDA yang menyatakan bahwa :

Pertumbuhan PAD antara tahun 2013 – 2014 meningkat sangat tajam dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2013 pemda Sumedang melakukan upaya pendataan ulang terutama terkait pendataan PBB-P2, hal tersebut pemda lakukan sebagai bentuk upaya mendobrak penerimaan dari sektor pajak daerah. Dan hal tersebut terbukti peningkatan pertumbuhan PAD cukup tinggi. Sedangkan pertumbuhan untuk tahun selanjutnya yaitu 2014 – 2015 hanya terjadi sekitar 8% padahal pemda Sumedang

berharap setelah pendataan ulang saat itu akan terus meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan perhitungan dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemda Sumedang berupaya untuk meningkatkan PAD Sumedang dan terbukti PAD Sumedang terus meningkat tiap tahunnya sekalipun peningkatannya tersebut masih fluktuatif.

#### **Pembahasan/Analisis**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel kinerja keuangan berikut :

**Tabel 5**  
**Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2015**

Rasio Keuangan	Tahun					Rata-Rata	Kriteria
	2011	2012	2013	2014	2015		
Derajat Desentralisasi Fiskal	10%	11%	11%	14%	14%	<b>12%</b>	<b>Kurang</b>
Kemandirian Keuangan Daerah	12%	13%	13%	18%	16%	<b>14%</b>	<b>Instruktif</b>
Pertumbuhan PAD	29%	16%	17%	59%	8%	<b>26%</b>	-

**Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017**

Tabel tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang selama tahun anggaran 2011 hingga 2015 yang dihitung menggunakan rasio keuangan yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah. Secara keseluruhan kinerja keuangan Kabupaten Sumedang relatif rendah, bukan hanya berdasarkan hasil

perhitungan rasio keuangan semata namun juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumedang yang menunjukkan angka 12% jika diukur menggunakan skala interval yang digunakan dalam penelitian ini masih berada pada skala

10.01 – 20.00 yang menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal masih **kurang**. Dalam keadaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan Kabupaten Sumedang menggali potensi PAD guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah masih kurang atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan daerah masih didominasi dengan dana transfer.

Hasil perhitungan rasio di atas diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam hal ini oleh Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) memang masih kurang. Untuk pengelolaan potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi saja masih dalam proses pembenahan seperti dalam pernyataan Kepala BAPPENDA dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 26 Januari 2017 yaitu sebagai berikut:

Potensi PAD Kabupaten Sumedang terutama dari sektor pajak dan retribusi sebenarnya masih banyak yang belum dikembangkan seperti dengan adanya salah satu pembangunan besar seperti Waduk Jatigede dan Pusat Perbelanjaan Modern (Asia Plaza Sumedang) namun untuk pelaksanaan maupun regulasinya masih belum terbentuk, seperti retribusi untuk pengunjung wisata Waduk Jatigede masih banyak yang dikelola oleh masyarakat sehingga untuk masuk ke kas daerahnya masih kurang. Sedangkan untuk pajak parkir baik yang sudah ada maupun yang akan ada setelah adanya Pusat Perbelanjaan Modern Asia Plaza pun masih dalam proses untuk beralih ke sistem mesin sehingga pendataan pendapatan pajaknya dapat terukur.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan salah satu permasalahan adanya otonomi fiskal di Kabupaten Sumedang ialah potensi PAD yang ada relatif belum mampu menanggung penyelenggaraan pemerintahan yang tidak

ketergantungan terhadap dana transfer. Selain itu peneliti mengamati bahwa salah satu penyebab rendahnya PAD tersebut ialah dari sumber daya manusianya yang menjalankan manajemen untuk bisa menggali potensi PAD yang banyak.

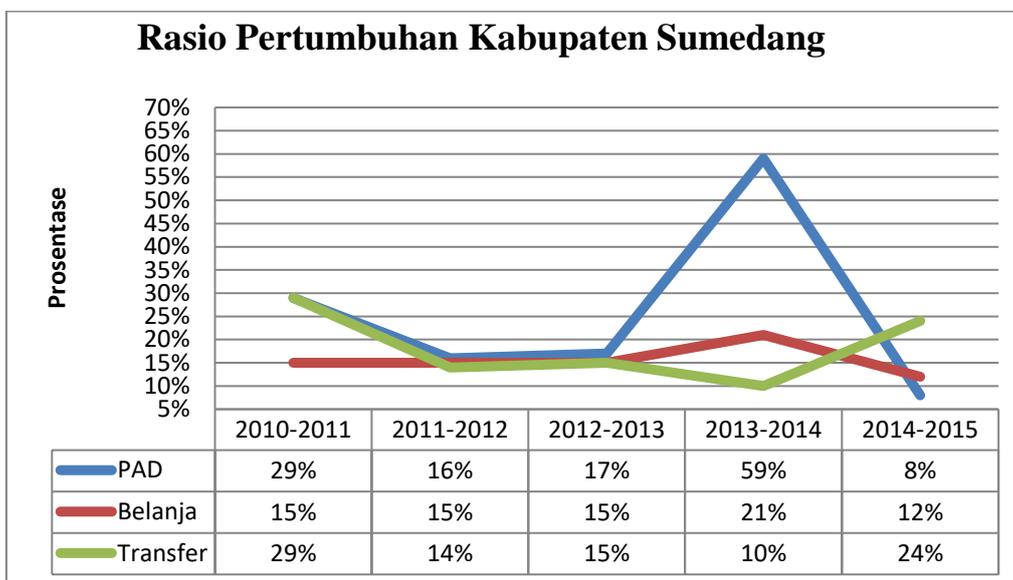
Selanjutnya untuk perhitungan rasio menunjukkan adanya kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang setiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebanyak 2%. Rata-rata rasio ini dalam kurun tahun 2011 hingga 2015 yaitu sebesar 14%. Dalam skala interval menunjukkan pola hubungan yang terbentuk antara pemerintah pusat dan Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan keuangan berada pada interval 0 – 25% yang menunjukkan pola hubungan keuangan yang **instruktif**. Pola instruktif ini mengartikan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian keuangan pemerintah daerah itu sendiri atau dengan kata lain Kabupaten Sumedang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial karena dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan hingga pembangunannya masih mengandalkan dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan pembahasan dalam perhitungan rasio sebelumnya bahwa Kabupaten Sumedang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer.

Adapun untuk Rasio pertumbuhan Kabupaten Sumedang Berdasarkan perhitungan ketiga rasio pertumbuhan yaitu PAD, belanja dan transfer Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya baik itu PAD, belanja maupun transfer daerah mengalami peningkatan jumlah anggaran, namun perbandingan pertumbuhan tiap tahunnya terjadi secara fluktuatif, adakalanya mengalami

peningkatan dan penurunan. Namun demikian, komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang ialah agar tetap mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan maupun belanja daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dapat

berkurang dan pelaksanaan otonomi fiskal dapat terlaksana.

Berdasarkan grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan baik PAD, belanja maupun transfer Kabupaten Sumedang terjadi secara fluktuatif, yaitu :



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

**Grafik 1**  
**Grafik Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sumedang tahun 2011 – 2015**

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan diatas dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan maupun belanja daerah serta potensi-potensi mana yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sehingga kinerja keuangan daerah dapat ditingkatkan.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan analisis regresi yang mengukur hubungan variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan dan satu variabel yang berpengaruh signifikan secara negative

terhadap kinerja keuangan daerah. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yaitu sebesar 19.390. Pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa PAD menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah, selain itu juga PAD menjadi indikasi bahwa daerah tersebut dapat melaksanakan desentralisasi fiskal.

#### **2. Dana Transfer**

Hasil analisis regresi menunjukkan dana transfer merupakan faktor yang berpengaruh signifikan secara negatif yaitu sebesar – 44.072 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Pengaruh secara

negatif tersebut artinya bahwa ketika dana transfer tinggi maka kinerja keuangan daerah akan rendah dan pengaruhnya tersebut berlaku secara signifikan.

### 3. Aser Tetap

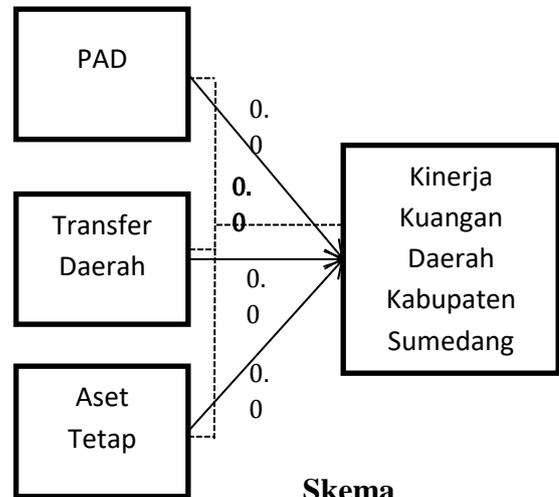
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Sumedang sebesar 71.171. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sumedang pada 31 Januari 2017 menyatakan bahwa:

Aset tetap Kabupaten Sumedang kebanyakan adalah aset yang digunakan oleh SKPD untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan maupun pembangunan, sedangkan aset tetap yang sifatnya *non idle* terutama yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat maupun pihak investor yang akan meningkatkan PAD sedikit sehingga dapat dikatakan untuk aset tetap yang dimiliki pemda tidak banyak berpengaruh untuk PAD Kabupaten Sumedang.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah jika sifat aset tetap tersebut *non idle* atau tidak hanya digunakan oleh SKPD melainkan dimanfaatkan baik oleh pihak ketiga maupun masyarakat untuk menambah PAD. Sedangkan kenyataannya aset tetap Kabupaten Sumedang kebanyakan digunakan oleh pemda, dan berdasarkan perhitungan rasio *aset turnover* pun menunjukkan aset tetap hanya menyumbang sebesar 10% terhadap pemerolehan PAD itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah diatas secara simultan atau bersamaan juga akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebagaimana hasil uji F yang menunjukkan pengaruh ketiga variabel diatas sebesar 0.010 ( $0.010 < 0.05$ ) terhadap

kinerja keuangan daerah. Jika digambarkan seperti skema uji t dan uji F maka akan terlihat seperti berikut:



Keterangan :  
 Uji t  
 Uji F  
 Uji Y

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017

Berdasarkan skema pengujian di atas dapat terlihat hubungan pengaruh baik secara parsial maupun simultan setiap variabel bebas terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Hubungan pengaruh tersebut diperkuat dengan analisis koefisien determinasi yang menunjukkan hubungan pengaruh sebesar 1.000 atau menurut interval koefisien menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Adapun kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang menurut koefisien determinasi berdasarkan perolehan angka pada *R Square* yaitu sebesar 1.000 artinya kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang, 100% dipengaruhi oleh variabel PAD, dana transfer dan aset tetap.

### Penutup

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2011 hingga 2015 relatif kurang. Adapun rincian analisis dapat dilihat sebagai berikut:
  - a. Analisis rasio derajat desentralisasi fiskal daerah menunjukkan angka rata-rata selama lima tahun anggaran yaitu sebesar 12%, artinya derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumedang masih kurang.
  - b. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kriteria instruktif dengan rata-rata selama lima tahun anggaran yaitu sebesar 14%, artinya Kabupaten Sumedang masih sangat ketergantungan kepada dana transfer untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Analisis pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan selama lima tahun anggaran terjadi sebesar 25%, sedangkan pertumbuhan belanja daerah dan dana transfer mengalami pertumbuhan selama lima tahun anggaran sebesar 16%. Pertumbuhan tersebut terjadi secara fluktuatif, artinya selama lima tahun anggaran tersebut pertumbuhan PAD, belanja daerah, dan dana transfer tidak selalu mengalami kenaikan persentase pertumbuhan namun juga mengalami penurunan. Hal tersebut bisa terjadi karena penyerapan anggaran yang terjadi tidak stabil selama lima tahun anggaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan analisis regresi menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 19.390, dana transfer berpengaruh signifikan secara negatif sebesar - 44.072 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang serta aset tetap berpengaruh signifikan sebesar 77.171 terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dana transfer yang diterima hendaknya diperhatikan pemerintah daerah dengan menjadikan hal tersebut sebagai bagian evaluasi untuk terus mendobrak PAD Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan identifikasi potensi pajak terutama untuk menggali potensi yang sedang berkembang maupun yang akan berkembang seiring pembangunan yang berjalan di Kabupaten Sumedang sehingga potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sektor pendapatan pajak maupun retribusi daerah.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sebaiknya melakukan penetapan anggaran PAD yang didasarkan pada potensi daerah bukan sekedar didasarkan pada target PAD, sehingga perlu dilakukan penataan maupun sensus yang optimal dalam menggali potensi daerah yang ada.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang perlu melakukan reformasi pemungutan pajak dengan pengalihan sistem manual menuju berbasis teknologi, hal tersebut diperlukan agar

- transaksi pembukuan berlangsung secara transparan, akuntabel dan akurat.
5. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang seharusnya mengoptimalkan semua aset tetap yang dimiliki untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD.
  6. Selain reformasi pajak dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu memperkuat regulasi terkait retribusi pada potensi pendapatan retribusi yang sudah ada agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
  7. Pemerintah daerah harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya pembangunan di Kabupaten Sumedang yang memungkinkan masuknya investor yang akan membantu pembangunan tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga baik masyarakat, pemda maupun pihak ketiga dapat bekerjasama dalam membangun Kabupaten Sumedang.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Baridwan, Zaki. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga
- Berg. 2001. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. United States of America: Allyn and Bacon
- Creswell, John W. 2013. *Research Design : Qualitative, Quantitative an Mixed Method Approach*. California : SAGE
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta
- Gitman, J Lawrence. 2000. *Principle of Managerial Finance*. RR Donnelley and Sons Company
- Given, Lisa M (Ed). 2008. *The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Methods*. USA : Sage
- Gorard, Stephen. 2003. *Quantitative Methods in Social Science*. Norfolk King's Lynn
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hutagalung, Edward M. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. Sumedang : Alqaprint
- Ibnu, Syamsi. 1983. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara

- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kothari, C.R. 2004. *Research Metodology : Methods and Techniques. Second Revised Edition*. New Delhi : New Age International Limited Publishers
- Leopold A. Bernstein dan John J. Wild. 1998. *Financial Statement Analysis, Theory, Application and Interpretation*. Irwin McGraw-Hills.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahsun, Mohamad, dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Mardiasmo. 2002 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :
- Andi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :
- Andi, Render, Barry, dkk. 2012. *Quantitative Analysis Research Principles and Methods 7th edition*. USA
- S. Pamudji. 1980. *Pembinaan Perkotaan \ di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar
- Sinurat, Marja. 2016. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung : Pustaka
- Rahmat Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nohi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Weston, J Fred dan Thomas E Copeland. 1995. *Manajemen Keuangan*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Vanderstoep, Scott W and Johnston, Deirdre. 2009. *Research Methods for Everyday Life : Blending Qualitative and Quantitative Approach*. USA : Jossey-bass
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia

## **B. Skripsi, Tesis dan Jurnal**

- Assidiqi, Bahrn. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Setiawan, St Benny. 2015. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 - 2013 Pemerintah Kota Jambi*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suyono. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.